

**Faktor – faktor utama yang mempengaruhi penerapan Prinsip –
prinsip dasar Good Corporate Governance di Indonesia.**

(studi empiris pada Perusahaan Publik di Jakarta tahun 2015)



UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

DIAJUKAN OLEH

NAMA : SALIKIM

NIM : 127131012

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

GUNA MENCAPAI GELAR

MAGISTER AKUNTANSI

2016

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : SALIKIM
NO.MAHASISWA : 127131012
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN
JUDUL TESIS : **Faktor – faktor utama yang mempengaruhi
penerapan Prinsip – prinsip dasar Good Corporate Governance di Indonesia.
(studi empiris pada Perusahaan Publik di Jakarta tahun 2015)**

Jakarta, 2016

Pembimbing,

Dr. Jan Hoesada

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN TESIS
SETELAH LULUS UJIAN TESIS**

NAMA : SALIKIM
NO.MAHASISWA : 127131012
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN
JUDUL TESIS : **Faktor – faktor utama yang mempengaruhi
penerapan Prinsip – prinsip dasar Good Corporate Governance di Indonesia.
(studi empiris pada Perusahaan Publik di Jakarta tahun 2015)**

Tanggal : KETUA PENGJUJI :

(.....)

Tanggal : ANGGOTA PENGJUJI

(.....)

Tanggal : ANGGOTA PENGJUJI

(.....)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya Mahasiswa Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara:

Nama : Salikim

NIM : 127131012

Program : MAGISTER AKUNTANSI

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir (tesis) yang saya buat dengan judul :
Faktor – faktor utama yang mempengaruhi penerapan Prinsip – prinsip dasar Good Corporate Governance di Indonesia.

(studi empiris pada Perusahaan Publik di Jakarta tahun 2015)

Adalah :

1. Dibuat sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan referensi acuan, yang tertera di dalam referensi pada tugas saya.
2. Tidak merupakan hasil duplikat Tesis yang telah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister di Universitas lain kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Tidak merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku dan referensi acuan yang tertera dalam referensi pada tugas akhir saya.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka tugas akhir ini batal.

Jakarta, 2016

Yang membuat pernyataan,

(Salikim)

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga Tesis yang berjudul **“Faktor – factor utama yang mempengaruhi penerapan Prinsip – prinsip dasar Good Corporate Governance di Indonesia. (studi empiris pada Perusahaan Publik di Jakarta tahun 2015)”** ini dapat penulis selesaikan.

Penulis sadari bahwa penulisan Tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, dorongan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Tarumanagara yang memberikan ijin kepada penulis untuk menempuh studi program pascasarjana
2. Pimpinan/Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Tarumanagara yang menerima penulis sebagai karya mahasiswa Program PascaSarjana
3. Bapak. Dr.Jan Hoesada, selaku pembimbing I yang banyak menyumbangkan ide yang cemerlang serta pikiran sehingga semua permasalahan yang terdapat dalam proposal tesis ini dapat selesai.
4. Istri dan Anak yang telah memberikan dorongan / motivasi kepada penulis sehingga selalu berusaha untuk tetap semangat dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Para mahasiswa Universitas Tarumanagara dan mahasiswa pascasarjana angkatan sebelumnya pada khususnya dan teman-teman

kerja yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya, penulis mohon maaf kepada semua pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis / penelitian ini apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Semua itu bukan merupakan suatu kesengajaan tetapi semata-mata untuk proses pembelajaran untuk yang lebih baik dan penulis sadar betul masih banyak kekurangan disana sini maka kritik dan sarannya penulis sangat harapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan rahmat agar proposal penelitian ini bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Tangerang, 2016

Salikim

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latarbelakangmasalah	1
1.2. IdentifikasiMasalah	8
1.3. PembatasanMasalah	10
1.2 Perumusanmasalah	11
1.3 TujuanPenelitian	12
1.4 Manfaatpenelitian	13

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Good Corporate Governance (GCG)

2.1.1	Pengertian Good Corporate Governance	14
2.1.2	Prinsip-prinsip Good Corporate Governance	16
2.1.3	Struktur Good Corporate Governance	21
2.1.4	Mekanisme Good Corporate Governance	23
2.1.5	Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance	27
2.1.6	Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip- Prinsip Good Corporate Governance	34
2.2.	Definisi Konseptual Variabel	37
2.3.	Kaitan antar variabel	51
2.4.	Kerangka pemikiran dan hipotesa	54

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Desain Penelitian	58
3.2.	Lokasi Penelitian	58
3.3.	Populasi dan Sampel	58
3.4.	Metode Pengumpulan Data	59
3.5.	Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel	59
3.6.	Metode Analisa Data	61

3.6.1. Statistik Deskriptif	61
3.6.2. Uji Kualitas Data	62
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	64
3.6.4 Pengujian Hipotesis	66

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskriptif Data	70
4.2. Analisis Data	
4.2.1 Uji Validitas	73
4.2.2 Uji Reliabilitas	75
4.3. Uji Asumsi Klasik	
4.3.1 Pengujian Normalitas	76
4.3.2 Pengujian Multikolinearitas	77
4.3.3 Pengujian Heteroskedastisitas	78
4.4. Deskripsi Statistik	
4.5 Pengujian Hipotesa	81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	86
5.2. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

3.1. Model KerangkaKonsepPenelitian	55
4.1. PengujianHeteroskedastisitas	79

DAFTAR TABEL

3.1. Tabel Definisi Operasional Variabel	61
4.1. Tabel Pengumpulan Data	71
4.2. Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	71
4.3. Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	72
4.4. Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	72
4.5. Tabel Uji Validitas	74
4.6. Tabel Uji Realibilitas	75
4.7. Tabel Hasil Pengujian Reliabilitas	76
4.8. Uji Normalitas Data	77
4.9. Tabel Pengujian Multikolinearitas	78
4.11. Tabel Rangkuman Statistik Deskriptif	80
4.12. Tabel Uji t parsial X1 terhadap Y	81
4.13. Tabel Uji t parsial X2 terhadap Y	82
4.14. Tabel Uji t parsial X3 terhadap Y	82
4.15. Tabel Uji t parsial X4 terhadap Y	83

4.16. TabelUjiStatistik F (Simultan)	84
4.17. TabelAnalisisKoefisienDeterminasi	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi global yang melanda kawasan Asia Timur pada akhir tahun 1997 dan terbukanya skandal keuangan berskala besar misalnya kasus yang terjadi pada Enron dan Worldcom mengakibatkan para ahli ekonom mendiskusikan peran dari *system corporate governance* (CG) untuk mengatasi masalah tata kelola perusahaan dalam suatu negara. CG berkembang menjadi sebuah topik yang menarik untuk di teliti saat ini. Hal ini karena meningkatnya kebutuhan untuk menerapkan konsep CG yang disuarakan secara global. Hashim (2009) dalam Pramono (2011) mendefinisikan CG sebagai kombinasi dari proses dan struktur yang dilakukan oleh dewan direksi untuk mengotorisasi, mengarahkan, dan mengawasi manajemen untuk menuju pencapaian dari tujuan tersebut. Definisi tersebut menggambarkan perlunya penerapan CG dalam mengawasi manajemen untuk pencapaian tujuan perusahaan. Definisi CG dalam sudut pandang berbeda disampaikan oleh Rezaee (2007) dalam Pramono (2011) yaitu proses yang terus menerus dari pengelolaan, pengendalian, dan penilaian bisnis untuk menciptakan nilai pemegang saham (*shareholder*) dan melindungi kepentingan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa CG merupakan alat untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham serta melindunginya dari benturan kepentingan. Di Indonesia, GCG mulai banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan setelah terjadinya

krisis moneter 1997. Para pengamat ekonomi menyatakan bahwa krisis moneter terjadi karena adanya pola praktik *corporate governance* yang buruk di negara-negara Asia khususnya di Indonesia

Istilah *Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report (Tjager dkk., 2003). Definisi *Good Corporate Governance* dari Cadbury Committee yang berdasar pada teori *stakeholder* adalah sebagai berikut : “A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities”.(Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka). Pengertian lain menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Permasalahan *Good Corporate Governance* (GCG) saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan bagi suatu perusahaan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan publik, baik dikarenakan peraturan maupun yang ingin masuk ke dalam pergaular bisnis internasional. Di lain sisi GCG juga merupakan elemen penting di dalam

memberikan kontribusi terhadap kesuksesan suatu perusahaan, sama pentingnya dengan tolak ukur kondisi keuangan suatu perusahaan. Isu *corporate governance* itu sendiri muncul sejak diperkenalkannya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan (Tri Gunarsih, 2003). Namun istilah *corporate governance* itu sendiri secara eksplisit muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam tulisan Robert I. Tricker. Di dalam bukunya, Tricker memandang *corporate governance* memiliki empat kegiatan utama sebagai berikut:

Direction: Formulating the strategic direction from the future of the enterprise in the long term; Executive action: Involvement in crucial executive decisions; Supervision: Monitoring and oversight of management performance, and Accountability: Recognizing responsibilities to those making legitimate demand for accountability. (Tricker, Robert I., 1984, *Corporate Governance – Practices, Procedures, and Power in British Companies and Their Board of Directors*, UK, Gower)

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki, integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Sementara *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson,

seorang professor dari Harvard, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai *agents* bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship model* (Mas Achmad Daniri, 2014). Penerapan GCG muncul tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep GCG namun dilatar belakangi oleh maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar dan berdampak sangat luas terhadap perekonomian suatu negara bahkan berdampak secara internasional. Pada saat ini perusahaan (korporasi) telah berkembang dari sesuatu yang relatif tidak jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang amat dominan. Kekuatan tersebut terkadang mampu mendikte hingga ke dalam pemerintahan suatu negara, sehingga menjadi tidak berdaya dalam menghadapi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berpengaruh tersebut. Semua itu terjadi karena perilaku tidak etis dan bahkan cenderung kriminal yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang memang dimungkinkan karena kekuatan mereka yang sangat besar disatu sisi, dan ketidakberdayaan atau mentalitas korupsi aparat pemerintah dalam menegakkan hukum dan pengawasan atas perilaku para pelaku bisnis tersebut. Disamping berbagai praktik tata kelola perusahaan dan pemerintahan yang buruk. Salah satu dampak signifikan yang terjadi adalah krisis ekonomi di suatu negara, dan timbulnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sebagai akibat adanya tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahaan-perusahaan besar yang mana mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para *investor*,

seperti yang terjadi krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997 – 1998 serta Amerika pada awal tahun 2000 dan tahun 2008 yang mengakibatkan runtuhnya beberapa perusahaan besar dan ternama dunia seperti Enron, Worldcom. Disamping juga menyebabkan krisis global di beberapa belahan negara dunia. Sebagai contoh, untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah Amerika mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Undang-undang dimaksud berisikan penataan kembali akuntansi perusahaan publik, tata kelola perusahaan dan perlindungan terhadap *investor*. Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi acuan awal dalam penjabaran dan penciptaan GCG diberbagai negara. Konsep GCG belakangan ini makin mendapat perhatian masyarakat dikarenakan GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi yang mencakup:

1. Tanggung jawab dewan komisaris dan direksi terhadap perusahaan itu sendiri, kepada para pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan.
2. Transparansi, baik yang berhubungan dengan kualitas informasi maupun terkait dengan struktur dan operasional perusahaan.
3. Hak-hak para pemegang saham (*shareholders*) dan perlindungannya, khusus hak pemegang saham minoritas.
4. Tanggung jawab perusahaan terhadap para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya seperti Pemerintah, Masyarakat, Pelanggan maupun Pemasok.
5. Penerapan prinsip independensi sehingga masing – masing pihak yang ada di perusahaan berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan.

Dari segi peraturan Pemerintah, beberapa peraturan telah dikeluarkan seperti; peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pemerintah sebagai pihak yang mengatur (*regulator*) jalannya roda perekonomian memiliki peranan sangat penting sehingga bisnis yang dijalankan oleh berbagai perusahaan tetap berjalan sesuai jalur yang telah ditetapkan. Apabila terdapat pelanggaran terhadap etika bisnis oleh perusahaan, maka perlu dilakukan tindakan sesuai dengan bobot kesalahannya, bahkan kalau diperlukan perusahaan yang bersangkutan dapat ditutup usahanya. Selain itu Bank Indonesia pada tanggal 30 Januari 2006 yang lalu telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Upaya BI dengan mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan GCG tersebut sudah tepat, meskipun agak terlambat. Tujuan dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku serta nilai – nilai etika (*ethics values*) yang berlaku umum pada industri perbankan. Pihak Kementerian BUMN telah lebih dahulu mengeluarkan ketentuan tentang penerapan praktik GCG pada BUMN sesuai Surat Keputusan No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002. Semoga semakin banyak perusahaan (termasuk BUMN dan perbankan) yang menerapkan prinsip GCG dan etika bisnis, sehingga dapat mencegah terjadinya kebangkrutan perusahaan serta roda perekonomian

dapat pulih seperti sebelum terjadinya krisis ekonomi melanda negeri kita pada tahun 1997 – 1998.

Pada tahun 2001, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menerbitkan pedoman GCG. Pedoman ini bertujuan agar dunia bisnis memiliki acuan dasar mengenai konsep serta pola pelaksanaan GCG yang sesuai dengan pola internasional umumnya dan Indonesia khususnya. Melalui penerapan GCG tersebut diharapkan:

- a. Perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta mampu meningkatkan pelayanannya kepada *stakeholder*,
- b. Perusahaan lebih mudah memperoleh dana pemberdayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*,
- c. Mampu meningkatkan kepercayaan *investor* untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan dividen.

Beberapa bukti empiris yang menunjukkan bahwa penerapan GCG dapat mempengaruhi kinerja perusahaan antara lain:

(1) Menurut Accounting Analysis Journal {AAJ 1 (2) (2012)} berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Winda Putri (2006) terhadap perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEJ menunjukkan GCG secara statistik mempengaruhi kinerja perusahaan,

(2) Masih menurut Accounting Analysis Journal {AAJ 1 (2) (2012)} berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yudha Pranata (2007) terhadap perusahaan *go public* di BEJ yang termasuk dalam kelompok sepuluh besar perusahaan berdasarkan indeks GCG menunjukkan bahwa penerapan GCG secara signifikan dapat meningkatkan *return on equity, net profit margin*.

(3) Arifin (2005), Kirmizi (2010), Berdasarkan struktur organisasi yang umum terdapat di Indonesia, dengan melihat posisi yang sejajar antara dewan komisaris dan dewan direksi (manajemen) pada perusahaan – perusahaan di Indonesia, mengakibatkan kedudukan dewan komisaris di Indonesia tidak sekuat seperti dewan komisari di negara – negara Eropa, karena dewan komisaris tidak berwenang mengangkat dan memberhentikan dewan direksi. Dewan direksi tidak bertanggung jawab terhadap dewan komisaris. Bila ditinjau dari perspektif GCG, kedudukan yang sejajar ini dapat mengakibatkan pelaksanaan fungsi pengendalian (*control*) berjalan kurang efektif karena kemungkinan dapat terjadi dewan komisaris dianggap oleh dewan direksi sebagai partner kerja saja, bukan sebagai pengawas kerja dewan direksi.

(4) Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Frediawan (2008) terhadap PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) menunjukkan bahwa penerapan GCG yang dilakukan perusahaan tersebut mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari meningkatnya rasio *return on asset*. Namun ada penelitian lain yang dilakukan oleh Irene Dumasi Siahaan (2008) terhadap sepuluh perusahaan

sektor keuangan yang listing di BEI menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara penerapan GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan *economic value added*.

(5) Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD) (2013) melakukan survei terhadap perusahaan terbuka Indonesia yang menjadi Top 30 emiten dengan *score Corporate Governance* tertinggi tahun 2013 dimana emiten yang memiliki skor *Corporate governance* tertinggi memiliki kinerja yang baik di bisnisnya masing – masing serta harga saham yang relatif tinggi dibanding emiten lainnya. Pertumbuhan bisnis perusahaan – perusahaan inipun dari tahun ke tahun menunjukkan hal yang positif.

(6) Menurut CLSA (2013), Indonesia menempati urutan terbawah dalam hal penegakkan hukum, peraturan dan praktik GCG, termasuk juga dalam hal budaya *Coporate Governance* di antara negara – negara Asia.

(7) Klapper dan Love (2004) menggunakan tingkat return on asset (ROA) untuk mengukur kinerja perusahaan dan menemukan bahwa perusahaan dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik menghasilkan kinerja operasional yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini didukung oleh Setiawan (2012) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi GCG.

(8) Weisbach (1988) dan Klein (2002) menjelaskan bahwa terdapat hubungan korelasi negatif antara struktur kepemilikan dengan GCG, dimana konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap GCG *rating*.

(9) Darmawati (2006) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas implementasi GCG dengan indeks CGPI sebagai proksi. Penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian Ariff et al (2007) menyatakan hal serupa yaitu ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan log total aset berpengaruh signifikan terhadap GCG.

(10) Taman dan Nugroho (2010) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas implementasi GCG. Leverage adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh dana hutang dari kreditor.

(11) Black et al (2003), perusahaan yang berdiri sejak lama dianggap mampu mengelola perusahaan secara baik karena sistem manajemen yang telah tercipta baik sebagai hasil dari pengalaman dan pembelajaran yang cukup matang. Selain itu, umur perusahaan yang cukup matang menimbulkan kepercayaan dari publik terhadap kemampuan *going concern* suatu perusahaan sehingga banyak *investor* yang tertarik untuk menanamkan modal di perusahaan. Dari hal ini dapat disimpulkan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap implementasi GCG.

(12) Dunerv dan Kim (2002), Klapper dan Love (2003), dan Drobetz et al (2004) menemukan bahwa nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin's Q berpengaruh positif terhadap tingkat GCG perusahaan.

(13) Ariff et al (2007), karakteristik perusahaan terdiri dari 8 variabel yaitu profitabilitas, konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan, umur perusahaan, negara operasional, dan nilai perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan karakter atau unsur – unsur dari perusahaan yang dikelola

oleh manajemen. Dalam penelitian yang menganalisa pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *level GCG* di Malaysia. Hasil dari penelitian tersebut adalah karakteristik perusahaan berpengaruh signifikan terhadap GCG.

(14) Luhukay dan Rafick (2002) secara empiris terbukti bahwa investor bersedia memberi premium yang cukup tinggi kepada perusahaan yang menerapkan prinsip – prinsip GCG secara konsisten. Survei yang dilakukan juga membuktikan bahwa saham perusahaan yang di survei menikmati valuasi pasar sampai dengan 10% - 12%. Selain itu, bukti empiris juga menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG akan cenderung meningkat kinerjanya.

(15) McKinsey Consulting Group (2004) mengindikasi bahwa *investor* asing (Asia, Eropah, Amerika) bersedia memberikan premium sebesar 25 – 26% bagi perusahaan Indonesia yang secara efektif telah mengimplementasi praktik GCG. Kesimpulan yang dapat ditarik dari survei ini adalah bahwa semakin tingkat budaya GCG pada suatu negara, maka premium yang akan diberikan akan semakin tinggi kepada perusahaan yang menerapkan GCG.

(16) Aries (2008), Komisaris independen dengan jumlah tertentu dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan (syarat – syarat yang ditentukan untuk menjadi Komisaris Independen). Keberadaan Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, obyektif dan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama yang memperhatikan kepentingan saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Peran Komisaris Indenpenden diharapkan mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktik GCG pada perusahaan – perusahaan publik di Indonesia.

(17) Cartwright (1999) Pengendalian internal yang buruk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap lemahnya pelaksanaan GCG sehingga menyebabkan beberapa perusahaan tidak mampu memberikan pengawasan yang optimal terhadap jalan operasional perusahaan.

(18) Benny S. Tabalujan (2002), mengatakan bahwa salah satu alasan tidak berfungsinya hukum di negara berkembang, terutama di Indonesia, adalah hukum yang di adopsi dari negara barat berbenturan dengan budaya lokal atau hukum informal sebagai akibat dari tidak diperhatikannya faktor budaya masyarakat Indonesia. Ia berkeyakinan bahwa budaya lokal seperti patrimonial merupakan elemen penting budaya masyarakat yang berperan dalam mempengaruhi perilaku GCG di Indonesia.

(19) Lawrence A Cunningham (2004), menyatakan bahwa Komite Audit memiliki peranan penting dalam GCG di suatu perusahaan. Keefektifan mereka dalam mengawasi pengelolaan keuangan dan mengamati proses pelaporan keuangan merupakan hal yang penting untuk mendorong adanya laporan finansial yang terpercaya. Hal ini penting untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan *investor* terhadap perusahaan tersebut.

(20) Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini (2004), Penegakkan hukum sangat berpengaruh terhadap perwujudan GCG. Penegakkan hukum di Indonesia dianggap masih belum mencerminkan perlindungan yang menyeluruh dan belum memihak pada rasa keadilan seperti yang diharapkan masyarakat. Banyak permasalahan hukum, misalnya dalam beberapa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang diselesaikan dengan pendekatan politis dan bukan melalui

pendekatan hukum. Dengan perkataan lain, kepentingan politik banyak mewarnai proses hukum di negeri ini.

(21) Kompas, 8 Oktober 2006. Komite Audit seringkali mendapat banyak hambatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendorong iklim GCG di perusahaan tempat mereka bertugas. Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari eksekutif perusahaan belum cukup diberi keleluasaan dalam tugasnya dan kadang komite audit masih tunduk dibawah pengaruh dewan komisaris.

(22) Healy dan Wahlen (1998), akuntabilitas sebagai aspek GCG menjadi penting manakala manajemen menghadapi *intertemporal choice* yang memaksa manajemen melakukan manipulasi karena situasi yang dihadapinya. Manipulasi kinerja yang ditempuh dengan beberapa cara merupakan suatu upaya manajemen untuk menggunakan suatu keputusan tertentu untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi kontraktual yang mengandalkan angka akuntansi yang dilaporkannya.

(23) Gilberg dan Idson (1995), Permasalahan yang timbul dalam GCG merupakan akibat adanya masalah keagenan yang muncul dalam suatu organisasi. Berkaitan dengan struktur organisasi kepemilikan, terjadi ketidak selarasan kepentingan antara dua kelompok pemilik perusahaan, yaitu *controlling shareholders* dan *minority shareholders*. Seringkali *controlling shareholders* mengendalikan keputusan manajemen yang merugikan *minority shareholders*. Selain itu, struktur kepemilikan yang menyebar (*manager controlled*) juga memberikan kontribusi

lebih terhadap terjadinya masalah keagenan daripada struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (*owner controlled*).

(24) Lang dan Ludholm (1996), menyatakan bahwa pengungkapan yang lebih luas akan lebih banyak menarik analis, meningkat akurasi ekspektasi pasar, menurunkan ketidaksimetrisan pasar dan menurunkan kejutan pasar. Keterbukaan dan transparansi merupakan prinsip dasar dari GCG yang sangat mendasar bagi perusahaan yang menyampaikan informasi keuangannya kepada publik.

(25) Debra L. Nelson J.C (2010) mengatakan bahwa ketika sebuah perusahaan menerapkan prinsip – prinsip GCG yang meliputi *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*, dapat memunculkan *organizational citizenship behavior* pada karyawan perusahaan. Selain juga memunculkan *organizational citizenship behavior*, penerapan prinsip – prinsip GCG ini juga dapat membuat perusahaan lebih bertumbuh dan berkembang lebih baik lagi.

(26) Asril (2009), Mengemukakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (GCG) tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, dengan menjelaskan bahwa perusahaan yang mempunyai mekanisme GCG belum tentu memberikan dividen kepada pemegang saham.

(27) Hastuti (2005), menyatakan bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terkonsentrasi atau tidak terkonsentrasinya kepemilikan, manipulasi laba, serta pengungkapan laporan keuangan. Suatu perusahaan dengan manajemen yang menerapkan sistem pengelolaan yang baik (GCG) akan memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada para

stakeholders. Oleh karena itu, manajemen berkewajiban memberikan informasi akurat tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya.

(28) Jensen dan Mekling (1976) dalam Warsono dkk (2009) menyatakan hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan *investor* (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). GCG sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para *investor* yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek – proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan modal yang telah ditanam oleh *investor*.

(29) Sakai et al dan Balck et al (2003), Dengan GCG proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan.

(30) Beasley et al (1996) dan Abbot et al (2000), penerapan GCG yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan.

(31) Jojok Dwiridotjahjono (2008), aktivitas bisnis tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang melandasinya. Begitu juga halnya dengan penerapan GCG yang sudah tentu akan dipengaruhi oleh berbagai komponen yang ada di sekelilingnya. Komponen – komponen yang dimaksud, seperti hukum, budaya dan sebagainya. Ada yang bersifat mendukung, namun ada juga yang pada akhirnya menjadi kendala dalam aplikasinya.

(32) Diah Kusuma Wardani (2008), sesuai dengan teori agensi, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Disamping, perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan besar dapat memiliki masalah keagenan yang lebih besar (karena lebih sulit untuk dimonitor) sehingga membutuhkan *corporate governance* yang lebih baik. Di sisi lain, perusahaan kecil bisa memiliki kesempatan tumbuh yang tinggi, sehingga membutuhkan mekanisme *corporate governance* yang baik pula.

(33) Rika Nurlela dan Islahuddin (2008) mengatakan bahwa GCG dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007 – 2010. Berdasarkan penelitian ini diperoleh tingkat signifikansi tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa GCG dan Pengungkapan CSR memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

(34) Muljono (2006) Menyebutkan bahwa budaya organisasi adalah inti dari GCG. Untuk mencapai tujuan akhir didirikannya perusahaan tidaklah cukup hanya dengan menerapkan GCG. Namun, diperlukan juga dukungan faktor budaya organisasi sehingga menjadi *Good Corporate Culture* (GCC). Kajian ini berpedoman pada teori fit. Maksudnya, dengan adanya kesesuaian antara GCG dan budaya akan mampu mengurangi perilaku oportunistis atau disfungsional manajemen yang dapat menurunkan kinerja perusahaan. Dengan demikian, penerapan GCG diperusahaan perlu mendapat dukungan dari budaya organisasi untuk mencapai kinerja yang di inginkan.

(35) Daniri (2005) mengatakan tantangan terkini yang dihadapi Indonesia adalah masih belum dipahaminya secara luas prinsip – prinsip dan praktik GCG oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya. Akhirnya komunitas internasional masih menempatkan Indonesia pada urutan bawah *rating* implementasi GCG sebagaimana dilakukan oleh Standard & Poor, CLSA, Pricewaterhouse Coopers, Moody's Morgan dan Calper's.

(36) Chrisdianto (2013), Untuk menciptakan GCG dibutuhkan peran dari komite audit. Aplikasi tugas dari komite audit yang dilakukan sesuai dengan sistem yang ada akan membuat prinsip – prinsip GCG yaitu, *fairness, responsibility, accountability, transparency* dapat dipenuhi. Kondisi yang ada menyebabkan GCG bukan hanya tujuan tertulis saja tetapi juga mampu diwujudkan dengan adanya fungsi komite audit di perusahaan. Hal ini memenuhi tujuan untuk mampu memberikan pemahaman tentang peran komite audit dalam penciptaan GCG.

(37) Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH (2014), Penerapan prinsip GCG di Indonesia sangat dipengaruhi baik oleh faktor budaya maupun historis. Kedua aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, dan memiliki keterkaitan yang erat dengan elemen – elemen kemasyarakatan, dimana faktor – faktor tersebut memberikan kendala yang signifikan bagi pemerintah dalam memberlakukan dan menerapkan berbagai kebijakan. Kemajemukan dan kompleksitas masyarakat Indonesia juga merupakan faktor kesulitan dalam upaya menciptakan atau mengadopsi konsep – konsep GCG.

(38) Mitton (2002), melalui penelitiannya pada 398 sampel perusahaan di Asia (Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina dan Thailand) selama terjadinya krisis keuangan di Asia tahun 1997 – 1998 yang menyatakan bahwa GCG dapat melindungi *minority shareholder* dari ekspropriasi oleh manajer. Dalam penelitiannya menemukan bahwa perbedaan *level* GCG perusahaan memiliki pengaruh yang kuat pada kinerja perusahaan. Secara signifikan kinerja pasar yang lebih baik berhubungan dengan struktur kepemilikan dan kualitas pengungkapan (*disclosure*) yang lebih baik. Pengungkapan yang berkualitas adalah yang dilakukan seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) yang masuk dalam KAP terbesar di dunia, karena KAP ini tentunya akan memastikan adanya transparansi dan mengeleminasi kesalahan – kesalahan dari laporan keuangan perusahaan untuk menjaga reputasi.

(39) Trinanda dan Didin Mukodim (2010), hasil penelitian menunjukan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap *return on equity, return on investment,*

return on asset, dan *net profit margin*. Artinya, penerapan GCG yang baik akan mengakibatkan kinerja keuangan juga menjadi baik. Hal ini menggambarkan bahwa manajemen perusahaan menyadari manfaat jangka panjang dari penerapan GCG yaitu adanya dampak keuangan secara langsung seperti peningkatan laba bersih perusahaan dan akan menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang sehat.

(40) Sakai dan Asoka; Jang Black dan Kim (2003), dengan GCG proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, efisien dan terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat mempengaruhi secara efektif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan.

(41) Chtourou dkk (2001), menyatakan bahwa penerapan prinsip – prinsip GCG yang konsisten akan meghalangi kemungkinan rekayasa kinerja (*earnings management*) yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangan. GCG akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang – kurangnya dapat di minimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam mengelola perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak yang berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan penyalahgunaan wewenang oleh direksi.

(42) Beasley dkk (1990) dan Abbott dkk (2000), menyatakan bahwa penerapan GCG yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Management akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai

aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku serta penyajian informasi secara transparan.

(43) Djatmiko (2004), perusahaan – perusahaan di Indonesia belum mampu melaksanakan GCG dengan sungguh – sungguh sehingga perusahaan mampu mewujudkan prinsip – prinsip GCG dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan – perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan GCG demi terwujudnya prinsip – prinsip GCG dengan baik. Kendala ini dibagi dalam tiga yaitu kendala internal, kendala eksternal dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Kendala internal meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan terhadap prinsip GCG, seperti kurangnya panutan atau teladan yang diberikan pimpinan, belum adanya budaya perusahaan serta belum efektifnya sistem pengendalian internal. Kendala eksternal terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakkan hukum. Kendala ketiga adalah kendala yang berasal dari struktur kepemilikan saham. Berdasarkan prosentase kepemilikan dalam saham yaitu kepemilikan saham yang terkonsentrasi yaitu kepemilikan oleh seseorang atau sekelompok orang secara masif (40% atau lebih) atau kepemilikan yang menyebar dalam jumlah kepemilikan saham kecil – kecil (5% atau kurang).

Dalam kaitan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Faktor – faktor utama yang mempengaruhi penerapan prinsip – prinsip dasar, *Good Corporate Governance* di Indonesia".

1.2. Identifikasi Masalah :

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh GCG
- b. Peningkatan *return on equity* dipengaruhi oleh GCG
- c. Peningkatan *net profit margin* dipengaruhi oleh GCG
- d. Meningkatnya rasio *return on asset* dipengaruhi oleh GCG
- e. Peningkatan harga saham dipengaruhi oleh GCG
- f. Peningkatan profitabilitas dipengaruhi oleh implementasi GCG
- g. Peraturan mempengaruhi implementasi GCG
- h. Kedudukan dewan direksi mempengaruhi implementasi GCG
- i. Struktur konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap implementasi GCG.
- j. Ukuran perusahaan (*size of company*) mempengaruhi GCG
- k. *Leverage* mempengaruhi kualitas implementasi GCG
- l. Umur perusahaan mempengaruhi implementasi GCG
- m. Nilai perusahaan mempengaruhi implementasi GCG
- n. Karakteristik perusahaan mempengaruhi GCG
- o. *Investor* bersedia memberikan premium yang tinggi terhadap perusahaan yang menerapkan GCG
- p. Rasa keadilan mempengaruhi implementasi GCG
- q. Budaya perusahaan (*corporate culture*) mempengaruhi implementasi GCG
- r. Budaya perusahaan merupakan inti dari GCG

- s. Komisaris Independen mempengaruhi implementasi GCG
- t. Pengendalian internal (*internal control*) mempengaruhi implementasi GCG
- u. Penegakan hukum mempengaruhi implementasi GCG
- v. Komite Audit mempengaruhi implementasi GCG
- w. Praktik manipulasi laporan keuangan mempengaruhi GCG
- x. Komitmen pimpinan dan karyawan mempengaruhi implementasi GCG
- y. Struktur Organisasi Kepemilikan mempengaruhi GCG
- z. Pembagian deviden tidak mempengaruhi mekanisme GCG
- aa. Keterbukaan dan transparansi laporan keuangan mempengaruhi implementasi GCG
- bb. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen mempengaruhi implementasi GCG
- cc. Pengungkapan (disclosure) yang lebih luas terhadap laporan keuangan mempengaruhi implementasi GCG
- dd. Perusahaan skala besar membutuhkan implementasi GCG yang lebih baik
- ee. Pengungkapan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempengaruhi implementasi GCG
- ff. *Rating* suatu negara dalam kelayakan berinvestasi dipengaruhi oleh implementasi GCG
- gg. Perilaku oportunistis dan disfungsional manajemen mempengaruhi GCG
- hh. Kemajemukan dan kompleksitas masyarakat Indonesia mempengaruhi implementasi GCG

- ii. Krisis ekonomi yang terjadi di suatu negara merupakan akibat buruknya implementasi GCG.
 - jj. Kantor Akuntan Publik (KAP) besar mempengaruhi pelaksanaan implementasi GCG
 - kk. Perlindungan terhadap *minority shareholder* akan mempengaruhi implementasi GCG
- ll. Proses pengambilan keputusan mempengaruhi implementasi GCG
- mm. Rekayasa kinerja (*earnings management*) mempengaruhi implementasi GCG.
 - nn. Implementasi GCG sekurang – kurangnya atau mampu meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang dilakukan direksi perusahaan.
 - oo. Kendala internal perusahaan mempengaruhi implementasi GCG
 - pp. Kendala eksternal perusahaan mempengaruhi implementasi GCG
 - qq. Konsentrasi kepemilikan saham pada seseorang atau sekelompok orang mempengaruhi implementasi GCG.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas identifikasi masalah diatas dalam konteks permasalahan yang terdiri dari :

1. Pengaruh Independensi dan Kedudukan Dewan Direksi, Komisaris dan Komite Audit terhadap penerapan prinsip – prinsip dasar GCG di Indonesia

2. Pengaruh Budaya Perusahaan (*corporate culture*) terhadap penerapan prinsip – prinsip dasar GCG di Indonesia
3. Pengaruh Kepemilikan dan Komposisi Pemegang Saham terhadap penerapan prinsip – prinsip dasar GCG di Indonesia
4. Pengaruh Hukum dan Peraturan terhadap penerapan prinsip – prinsip dasar GCG di Indonesia

1.4. Perumusan Masalah

Masalah – masalah tersebut akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Independensi dan Kedudukan Dewan Direksi, Komisaris dan Komite Audit berpengaruh terhadap penerapan prinsip – prinsip dasar GCG di Indonesia
3. Apakah Budaya Perusahaan (*corporate culture*) berpengaruh terhadap penerapan prinsip – prinsip dasar GCG di Indonesia
4. Apakah Kepemilikan dan Komposisi Pemegang Saham berpengaruh terhadap penerapan prinsip – prinsip dasar GCG di Indonesia
5. Apakah Hukum dan Peraturan berpengaruh terhadap penerapan prinsip – prinsip dasar GCG di Indonesia
6. Apakah Independensi dan Kedudukan Dewan Direksi, Komisaris dan Komite Audit, Budaya Perusahaan, Kepemilikan dan Komposisi Pemegang Saham, Hukum dan Peraturan, secara bersama – sama berpengaruh terhadap penerapan prinsip – prinsip dasar GCG di Indonesia

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji implementasi prinsip – prinsip dasar GCG terhadap kegiatan sehari – hari dalam aktivitas perusahaan yang meliputi:

1. Menguji apakah Independensi Kedudukan Dewan Direksi, Komisaris, dan Komite Audit berpengaruh terhadap penerapan prinsip – prinsip dasar GCG di Indonesia.
2. Menguji apakah Budaya Perusahaan (*corporate culture*) berpengaruh terhadap penerapan prinsip – prinsip dasar GCG di Indonesia.
3. Menguji apakah Komposisi Kepemilikan Pemegang Saham berpengaruh terhadap penerapan prinsip – prinsip dasar GCG di Indonesia.
4. Menguji apakah Hukum dan Peraturan yang ada berpengaruh terhadap penerapan prinsip – prinsip dasar GCG di Indonesia.
5. Menguji apakah Independensi dan Kedudukan Dewan Direksi, Komisaris, dan Komite Audit, Budaya Perusahaan, Komposisi Kepemilikan Saham, Hukum dan Aturan secara bersama – sama berpengaruh terhadap penerapan prinsip – prinsip dasar GCG di Indonesia.

b. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Memberikan acuan bagi perusahaan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap manfaat yang ada atas penerapan prinsip – prinsip dasar GCG.
2. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh penerapan GCG di Indonesia; khususnya dalam aktivitas kegiatan operasional perusahaan publik sehari – hari.
3. Bagi peneliti lainnya, dapat dijadikan bahan referensi guna penelitian selanjutnya yang sejenis.
4. Bagi akademisi, dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai penerapan GCG di Indonesia, khususnya penerapan prinsip – prinsip dasar GCG pada perusahaan publik.
5. Bagi *investor*, dapat memberikan bahan masukan untuk pengambilan keputusan mengenai investasi pada perusahaan yang telah menerapkan GCG secara utuh dan nyata.

Daftar Pustaka:

Books:

Dr.Kadir,M.Pd, Penerbit, StatistikaTerapan (2015), Raja Grafindo Perkasa – Jakarta.

John Wiley & Son, Inc,Corporate Governance and Ethics (2009); Zabihollah Rezaee Ph.D., CPA, CMA, CIA, CGFM, CFE by.

Mas Achmad Daniri,Lead By GCG (2014),diterbitkanolehGagasBisnis Indonesia– Cetakanpertama.

Prof. DR. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (2004), Penerbit CV. Alfabetia – Bandung, edisi .

Prof DR.Sugiyono, StatistikauntukPenelitian (2015), Alfabetia

Sony Warsono, Fitri Amalia, dan Dian Kartika Rahajeng, Corporate Governance Concept and Model (2009), Center for Good Corporate Governance-FakultasEkonomidanBisnis UGM.

Journals:

Agung Rahmat *Good Coporate Governance (GCG) sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Study Kasus pada Community Development Center PT. Telkom)* – Jurnal Skripsi Feb UB 2013.

A.M.I Lakshan and W.M.H.N Wijekoon, *2nd Annual International Conference on Accounting and Finance (AF2012) Corporate Governance and Corporate Failure.* Procedia Economic and Finance 2 (2012) 191 – 198.

Agora vol. 2, No. 1, (2014) *Pengaruh penerapan prinsip – prinsip Good Corporate Governance terhadap Organizational Citizenship Behavior.*

Bernadius Chrisdianto, *Peran Komite Audit dalam Good Corporate Governance –* Universitas Surabaya, Jurnal Akuntansi Aktual, Vo. 2, No. 1, January 2013 halaman 1 – 8.

Djohari Santosa, Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik di Indonesia, Dosen Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. Jurnal Hukum no. 2, Vol. 15. April 2008, 182 – 185.

Djohari Santosa, Kegagalan penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik di Indonesia – Dosen FH UII – Yogyakarta pada Jurnal Hukum No. 2 Vol. 15, April 2008

EdySarjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawas Intern Dengan Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel Moderating di Perusahaan Umum Bulog Kantor Pusat dan Divre-divre Area Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT)*, Universitas Sumatera Utara (2013)

Gabriela Cynthia Windah, *Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap kinerja Keuangan Perusahaan hasil survey The Indonesia Institute Perception Governance (IICG) periode 2008 – 2011.* – Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya, Calyptre, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 No. 1 (2013).

H. Sri Sulistyanto / Maniek S. Prapti. *Good Corporate Governance: Bisakah Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat?* Jurnal Ekonomi dan Bisnis – Ekobis, Vol 4/No.1/Januari 2003

Herris B. Simanjuntak, *Legal Culture, Kendala Penerapan GCG di Indonesia.* Infobanknews.com, 20 Oktober 2012.

Igam Asri Dwija Putri, *Peranan Good Corporate Governance dan Budaya Terhadap Kinerja Organisasi,* Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (2012)

John Fisher, *Corporate Governance and management of Risk,* UnconfuseU – Best Management Practice, White paper April 2010.

Jojok Dwiridotjahjono – staf pengajar Jurusan Administrasi Bisnis FISIP – UPN “veteran” Jawa Timur, *Penerapan Good Corporate Governance (Tinjauan Manfaat, Kendala,*

Tantangan dan Kesempatan Bagi Perusahaan Publik di Indonesia),
Jurnal administrasi Indonesia Vol II No. 1 Juni 2008.

Kadek Krismaya Dewi, *Pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar Bali*, jurnal Akuntansi Universitas Udayana (2014)

Mariska Veres, Drs.ec. Stevanus Hadi Darmadji, MSA., *Hubungan Mekanisme Good Corporate Governance dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Konservatisme Akuntansi di Industri Perbankan Indonesia periode 2009 – 2011*, Qia. Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Calyptre, Jurnal Ilmiah Masasiswa Universitas Surabaya, Vol. 2, No. 1 (2013).

Muhammad Hidayat, *Analisis Terhadap Implementasi dan Hambatan Mewujudkan Good Corporate Governance*, Magister Kenotarisan, Universitas Indonesia (2009)

Mohamad Djasuli, SE., M.Si., QIA, Gabrila Aniza Putri, Gita Arasy Harwida, SE., M.Ak. Tax., QIA, *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Bai, Tingkat Hutang, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen (studi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*.

Nikhil Chandra Shil. JOAAC, *Accounting for Good Corporate Governance* Vol. 3, no. 1, Shil. N.C (2008).

Norlia Mat. Norwani, Zam Zuriyati Mohamad, Ibrahim Tamby Check, *Corporate Governance Failure and its Impact on Financial Reporting within selected companies*, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, no. 21, November 2011.

Priska Niawati, *Analisa Pengaruh Penerapan Corporate Governance, kepemilikan, dan ukuran (size) Bank terhadap kinerja Bank*, Magister Manajemen Universitas Indonesia (2011)

Ristifani, *Analisis Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Hubungan Terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma (2009)

Reny Dyah Retno M dan Denies Priantinah M.Si., Ak,*Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan. (Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007 – 2010)*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta – 2012.

Stijn Claessens, and Joseph PH Fan,*Corporate Governance in Asia, A Survey*, International Review of Finance, 3:2, 2002, pp 71 – 103.

Stijn Claessens, Simeon Djankov, Joseph Fan and Larry Lang,*Expropriation of Minority Shareholders: Evidence from East Asia*, World Bank, Hong Kong University for Science Technology and The University of Chicago. February 2009.

Stijn Claessens, Simeon Djankov, and Larry HP Lang, *The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations*, Journal of Financial Economics 58 (2000), 81 – 112.

Thomas S. Kaihatu, Staf pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra – Surabaya, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 8, no. 1, Maret 2006 halaman 1 – 9.

Vivi Sulvianti dan Mahendra Putra Kurnia, *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Pelita Jaya Prima di Tarakan*– Jurnal Beraja Niti ISSN 2337 – 4608 volume 2 nomor 11 (2013)

Werner R. Murhadi, *Good Coprorate Governance and Earning Management Practice; An Indonesia Cases*, Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, Jurnal Manajemen, Vol 10, no. 2, Mei 2010.

Links:

1. [WWW.academia.edu/10025452/Landasan teori kerangka pikiran dan hipotesis dalam metode penelitian](http://WWW.academia.edu/10025452/Landasan_teori_kerangka_pikiran_dan_hipotesis_dalam_metode_penelitian)
2. <http://www.spssindonesia.com>